umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Perbandingan target dan realisasi tahun Ini

Dalam upaya pengukuran kinerja sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu:

**Tabel 3.1**
Pencapaian Sasaran

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | Capaian | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | A | Belum Ada | 100% | Inspektorat |
| | | lndeks Kepuasan Masyarakat | Baik (85,25) | Baik | 100% | Pelayanan Bapenda |
| 2 | Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | lndeks Kemandirian Fiskal | 0,2284 | 0,2443 | 107% | LRA BKAD |

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.2**
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

| No | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | Belum Ada |
| 2 | lndeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | 79.43 | 88,12 | Baik (85,25) |
| 3 | lndeks Kemandirian Fiskal | Poin | - | - | 0,2443 |

Pada tahun 2023 dan 2022 untuk Capaian Sakip dan Indeks Kepuasan Masyarakat tidak menjadi Indikator Capaian Kinerja dari Badan Pendapatan Daerah

C. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah

Pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2024, dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

| No | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian 2024 | Target 2025 | Target 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Belum Ada | A | A |
| 2 | lndeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik |
| 3 | lndeks Kemandirian Fiskal | Poin | 0,2443 | 0,2369 | 0,2369 |

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

Mengenai perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten sampai saat ini masih belum ditemukan terkait standarnya, sehingga belum dapat dibandingkan.

Adapun untuk Pendapatan Asli Daerah mencapai Realisasi sebesar ***Rp 622,453,754,315,-*** dari Realisasi Pendapatan Daerah sebesar ***Rp 2,548,336,429,338,***-.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari:

- Hasil Pajak Daerah dengan target sebesar ***Rp.459.958.627.093,00,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.374.854.636.153,00,-*** atau ***81,50%*** yang didalamnya terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan persentase capaian realisasi tertinggi pada Pajak Reklame dengan capaian ***110,86%*** dan persentase capaian realisasi terendah pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian hanya sebesar ***41,95%.***

- Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar ***Rp.53.011.665.700,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.42.629.711.319,-*** atau ***80,42%*** yang didalamnya terdapat Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan persentase capaian realisasi tertinggi pada Retribusi Jasa Umum dengan capaian sebesar ***89,40%*** dan persentase capaian realisasi terendah Retribusi Jasa Usaha dengan capaian hanya sebesar ***34,66%.***

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target ***Rp.7.635.881.071,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.6.818.406.753,-*** atau ***89,29%*** yang didalamnya terdapat Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Dengan persentase capaian realisasi pada Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar ***91,28%.*** Sedangkan untuk Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta persentase capaian sebesar 0%.

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target sebesar ***Rp.221.839.417.552,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.198.151.000.090,-*** atau ***89,32%*** yang didalamnya terdapat Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Ganti Kerugian Keuangan

Daerah, Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan. Dengan persentase capaian realisasi tertinggi pada Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan capaian sebesar ***2.025,97%*** dan persentase capaian realisasi terendah pada Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain dengan capaian hanya sebesar ***0.02%.***

E. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja, serta alternative solusinya.

Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang kewenangannya pada sektor Pajak Daerah mendapatkan kenaikan capaian Pajak Daerah sebesar 36,69 Miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang mempengaruhi dari pencapaian pada tahun 2024 adalah :

- Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah beserta dengan Peraturan Bupati turunannya
- Rumah kost sudah tidak termasuk dalam definisi Jasa Perhotelan dan tidak lagi menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sehingga terdapat potensi yang hilang sebanyak 175 Wajib Pajak dan sebesar Rp269.176.500 (penerimaan objek rumah kost tahun 2023)
- Adanya batasan omset semula Rp. 1.500.000 per bulan, menjadi Rp. 7.500.000 per bulan sebanyak 128 WP sebesar Rp. 1.849.752.181 (Potensi Hilang)
- Adanya aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel, seluruh franchise yang induknya di Amerika tersebut

menurun rata rata ± 50% sebanyak 17 WP sebesar Rp. 4.412.921.276

- Perubahan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan selain diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang semula sebesar 15%, menjadi 10%
- Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang semula 35% menjadi 45%. Sementara sebanyak 85% Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kab. Purwakarta yakni dengan Jenis Objek Selain Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa Dengan demikian, perubahan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tersebut terdapat penurunan penerimaan
- Hilangnya beberapa potensi pajak reklame dampak dari kegiatan politik yang berlangsung dari tahun 2023-2024 (Pasal 60 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022)
- Adanya kenaikan tarif PBJT tenaga listrik dan Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dapat dipungut kembali berdasarkan peraturan terbaru
- Penurunan tarif pajak parkir yang semula 30% menjadi 10%
- Wajib Pajak Air Tanah yang telah habis masa izin pemanfaatan air tanah itu tidak keluar Nilai Perolehan Air (NPA) dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Sehingga penetapan Pajak Air Tanah oleh Bapenda menjadi terhambat
- Wajib Pajak Air Tanah yang telah habis masa izin pemanfaatan air tanah itu tidak keluar Nilai Perolehan Air (NPA) dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Sehingga penetapan Pajak Air Tanah oleh Bapenda menjadi terhambat
- Banyak WP yang tidak punya izin/izin telah habis dan tidak membayar sebanyak 29 WP

- Untuk MBLB tidak adanya potensi baru sumber daya alam yang terbatas beberapa wp tutup sebanyak 2 wp dan tidak berproduksi sebanyak 2 wp
- Untuk BPHTB, Target yang ditetapkan belum rasional
- Lalu untuk Nilai yang ada pada SK pemberian hak oleh BPN berupa NJOP Nilai transaksi yang dicantumkan oleh WP tidak mencerminkan harga riil pembelian NJOP bumi masih sangat rendah dari harga riil di lapangan, sementara NPOPTKP berubah dari Rp. 60.000.000 menjadi Rp. 80.000.000.

Dari beberapa hal yang disebutkan diatas, beberapa alternative solusi yang dirasa dapat mempertahankan ataupun meningkatkan capaian adalah dengan :

- Penguatan terhadap WP yang sudah terdata (Intensifikasi)
- Meningkatkan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan capaian indikator yang telah disebutkan diatas, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp. *31.191.824.836 dan realisasi sebesar Rp.29,534,333,133* meraih capaian kinerja 100%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((31.191.824.836\ x\ 1) - (29,534,333,133\ ))}{\sum_{i=1}^{n} ((31.191.824.836\ \ x\ 1)}\ x\ 100$$

$$\boldsymbol{E = 5,31\%}$$

Kemudian untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp.*5.115.025.600 dan realisasi sebesar Rp.4,721,455,840* meraih capaian kinerja

107%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((5.115.025.600\ x\ 1.07) - (4.721.455.840))}{\sum_{i=1}^{n} ((5.115.025.600\ x\ 1.07)} \ x\ 100$$

$$\boldsymbol{E = 13,73\%}$$

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program maupun kegiatan telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target kinerja, diantaranya menunjang peningkatan daripada pencapaian di tahun 2024, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi Perda PDRD (Notaris, Perusahaan, Kecamatan, Dan Desa/Kelurahan) serta Percepatan Peraturan Bupati turunan Perda tersebut
- PBB-P2 yang mengalami peningkatan sekitar 7,2 miliar ditunjang oleh kegiatan diantaranya : Hasil kegiatan pendataan 6 perusahaan tahun 2023, Penyesuaian NJOP Bumi kawasan Jatiluhur Industrial Smart City (JISC), Penyesuaian NJOP Bumi Perumahan, dan juga pelaksanaan operasi sisir
- Pelaksanaan kegiatan Uji Petik Pajak Hiburan pada tanggal 13-21 April 2024, Uji Petik Pajak Hotel pada bulan September), Uji Petik Pajak Restoran pada bulan Oktober, dan Pendataan PBJT Tenaga Listrik PLN pada bulan Mei.
- Pemberlakuan Nilai Wajar Atas Bumi Untuk Transaksi BPHTB tahun 2024
- Sinergitas dengan notaris/PPAT/PPATS berkaitan dengan

nilai transaksi riil yang dicantumkan wajib pajak dalam melakukan validasi SSPD-BPHTB

- Optimalisasi penagihan piutang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri
- Melakukan Sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah seperti : DPMD, Satpol PP, DPMPTSP, Kecamata, dan Desa/Kelurahan
- Sementara dari segi Lain-lain PAD yang Sah khususnya Pendapatan Denda Pajak Daerah terdapat kenaikan 363 Juta Rupiah dibanding tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya program penghapusan denda Pajak Daerah Lainnya

## *3.2 Realisasi Anggaran*

Dalam Proses pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 buah sasaran dan 3 buah indikator. Adapun Sasaran tersebut didukung pula oleh sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, tabel berikut ini akan menguraikan, anggaran, realisasi dan capaian kinerja per program:

**Tabel 3.2**
**Capaian Kinerja**
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta**
**Tahun Anggaran 2024**

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Program Pendukung | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Output | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** | **Capaian SAKIP Perangkat Daerah** | **A** | **A** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | ***31.191.824.836*** | ***29,534,333,133*** | **94.69** | | **Sangat Tinggi** |
| | | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **Baik** | **Baik** | | | | | | |
| **2** | **Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah** | **Indeks Kemandirian Fiskal** | **0,2248** | **0.2443** | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | ***5.115.025.600*** | ***4,721,455,840*** | **92.31** | | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Perencanaan pengelolaan pajak daerah** | *99.678.000* | *99.678.000* | 100 | 1 Dokumen | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.** | *129.765.700* | *129.765.700* | 100 | 1 Laporan | **Sangat Tinggi** |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Program Pendukung | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Output | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | - **Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah** | *72.000.000* | *17.100.000* | 24% | 1 Laporan | **Sangat Rendah** |
| | | | | | - **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah** | *166.087.000* | *156.225.908* | 94 | 1 Unit | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah** | *344.549.000* | *332.530.774* | 97 | 1 Laporan | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah** | *437.054.900* | *435.608.400* | 100 | 1 Laporan | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** | *1.664.975.000* | *1.579.639.860* | 95 | 6 Kecamatan | **Sangat Tinggi** |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Program Pendukung | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Output | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | - **Penetapan Wajib Pajak Daerah** | *211.148.000* | *208.098.000* | 99 | 461318 Dokumen | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah** | *313.492.000* | *310.478.000* | 99 | 12000 Layanan | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah** | *73.306.000* | *69.486.000* | 95 | 452600 Dokumen | **Sangat Tinggi** |
| | | | | | - **Penagihan Pajak Daerah** | *1.394.370.000* | *1.234.031.848* | 89 | 286327 Dokumen | **Tinggi** |
| | | | | | - **Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah** | *50.000.000* | *18.903.700* | 38 | 300 Dokumen | **Sangat Rendah** |
| | | | | | - **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah** | *120.000.000* | *94.647.700* | 79 | 40 Dokumen | **Tinggi** |
| | | | | | - **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah** | *38.600.000* | *35.261.950* | 91 | 4 Laporan | **Sangat Tinggi** |

Maka berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa capaian realisasi anggaran program dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 38 sub kegiatan dan anggaran sebesar ***Rp.31.191.824.836,-*** dan terealisasi sebesar ***Rp.29,534,333,133,-*** atau **94,69%**.

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 13 sub kegiatan dan Anggaran sebesar ***Rp.5.115.025.600,***- dan terealisasi sebesar ***Rp.4,721,455,840,***- atau **92.31%.**

Adapun total capaian realisasi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar **94%** Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan realisasi anggaran adalah ***Sangat Tinggi***.